

# EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rebifa Dwi Anesha

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

## **Abstrak**

*Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 10 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 44 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 158 berarti berada pada interval Cukup Baik.*

**Keywords: Evaluasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa**

## **Abstract**

*This research was conducted in Beringin Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Village Community Empowerment in Beringin Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was How to Empower Villages in Beringin Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials used the saturated sampling technique, where all populations were sampled, totaling 10 people. And for the community using a random sampling technique, namely taking sample members from the population carried out randomly without regard to strata that exist in that population. Which the number of samples for elements of society were to 44 people. Analysis of the data used was quantitative descriptive, which is analyzing data obtained from the results of questionnaires, then processed, and then the researcher make conclusions from the results of data processing. The results showed that the Empowerment of Village Communities in Beringin Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, an average value of 158 means that it is at a Good Enough interval.*

**Keywords : Evaluation, Empowerment of Village Communities**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui upaya-upaya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dimana melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia diharapkan mampu memberikan perubahan positif dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam konteks pembangunan ialah perubahan yang berlangsung secara nasional.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Paradigma pemberdayaan memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat ini kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin masih terjadi dan pemerataan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh sampai ke pelosok desa. Banyaknya masyarakat yang ikut berkecimpung dalam dunia politik juga menjadi penyebab dari lemahnya ekonomi karena semua berwawasan untuk mengurus negara namun mengesampingkan ekonomi, padahal ekonomi harus berjalan dulu baru melangkah ke politik, namun saat ini justru sebaliknya masyarakat mengurus politik yang akhirnya ekonominya sendiri menjadi kacau.

Pembangunan desa akan menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan dunia yang semakin demokratis. Akan tetapi perekonomian desa saat ini masih dianggap terbelakang dan miskin. Dan dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil karena lahan terbatas dan sempit. Semua masyarakat pedesaan masih berorientasi pada cara meningkatkan ekonomi hampir semua sibuk untuk bekerja seperti bertani, berdagang, beternak dan lain-lain.

Desa merupakan lembaga terkecil di dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pembangunan dan pemerintahan di dalamnya. Sebagai objek di dalam pembangunan, desa menjadi perhatian penting sebagai pusat pertumbuhan pembangunan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan desa menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat Desa. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatas, desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintah desa mengalokasi dana desa dengan seefektif mungkin. Dalam penelitian ini yang hanya akan berfokus mengenai pembinaan masyarakat desa.

Pemberdayaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya atau gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga pemberdayaan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya atau gotong royong masyarakat ; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran lainnya. Masyarakat dalam hal ini bisa diberdayakan dengan memberikan pengetahuan dan skill dan pendampingan dalam memproduksi sesuatu. Pengetahuan dan skill dan pendampingan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan intensif yang tidak dipungut biaya. Maka dalam proses pemberdayaan ini diperlukan sinergi kelompok-kelompok seperti sekolah Menengah dan sekolah tinggi pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koperasi Unit Desa dan Pemerintah Desa serta Dinas terkait. Lembaga-lembaga ini yang mempunyai banyak pengetahuan dan skill dibidang. Sedangkan Koperasi Unit Desa dapat menjadi penyalur bagi bahan, alat dan hasil-hasil banyak bidang-bidang lainnya.

Di desa Beringin Taluk terdapat banyak strategi untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintahan desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Berikut pemberdayaan masyarakat yang ada di desa beringin taluk pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 : Tabel Pemberdayaan Masyarakat Didesa Beringin Taluk

No	Jenis Pemberdayaan	Tahun				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	Pelatihan kapasitas BPD	√	√	√	√	Terlaksana
2	Peningkatan Kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa	-	√	√	-	Terlaksana
3	Pengkatan Kapasitas Kelompok usaha Ekonomi (Pelatihan Menjahit)	√	√	-	√	Terlaksana
4	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	-	√	-	√	Terlaksana
5	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan	-	-	√	-	Terlaksana
6	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	-	-	√	-	Terlaksana
7	Peningkatan Kapasitas PKK	-	-	√	-	Terlaksana
8	Penyertaan Modal BUMDesa	-	-	√	-	Terlaksana

9	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	-	-	-	√	Terlaksana
---	--	---	---	---	---	------------

Sumber : Desa Beringin Taluk 2019

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat di desa Beringin Taluk terdapat banyak strategi untuk pemberdayaan masyarakat. Cukup banyak program-program pemberdayaan yang diselenggarakan pada desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Berikut jumlah dan kriteria yang mendapat pemberdayaan di desa Beringin Taluk pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2 : Tabel Jumlah dan penerima Pemberdayaan Didesa Beringin Taluk

No	Jenis Pemberdayaan	Jumlah	Keterangan
1	Pelatihan kapasitas BPD	5 Orang	Anggota BPD
2	Peningkatan Kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa	10 Orang	Perangkat desa
3	Penigkatan Kapasitas Kelompok usaha Ekonomi (Pelatihan Menjahit)	40 Orang / (4 Kelompok)	Masyarakat
4	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	75 Orang / (5 Kelompok)	Masyarakat
5	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa	5 Orang	Sekdes dan Kaur Keuangan
6	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	5 Orang	Pengurus BUMDes
7	Peningkatan Kapasitas PKK	3 Orang	Ketua dan anggota PKK
8	Peningkatan produksi pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	-	Masyarakat

Sumber : Desa Beringin Taluk 2019

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat Jumlah dan penerima Pemberdayaan Didesa Beringin Taluk dengan kriteria penerima Pelatihan kapasitas BPD yang berjumlah 5 orang adalah anggota BPD, Peningkatan Kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa adalah orang-orang dalam pemerintahan desa, Penigkatan Kapasitas Kelompok usaha Ekonomi (Pelatihan Menjahit) rata-rata ibu-ibu yang tergabung dengan kelompok PKK yang siapa saja yang ingin ikut pelatihan ini, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa ialah pelatihan untuk sekdes dan bendahara/kepala urusan keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani kriteria penerima nya adalah masyarakat yang tergabung pada kelompok tani di desa beringin taluk, Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa kriteria penerimanya adalah para pengurus BUMDes, Peningkatan Kapasitas PKK kriteria penerima adalah Ketua dan anggota PKK. .

Cukup banyak program-program pemberdayaan yang diselenggarakan pada desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis menemukan beberapa masalah, memang terlaksana namun tidak optimal. Berikut permasalahan yang penulis temukan berdasarkan observasi dan mewawancarai dengan sekretaris desa dan beberapa warga :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah belum optimal, dimana pelaksanaan hanya sekedar pelaksanaan saja. Sekedar sudah terlaksana saja tanpa benar-benar memperhatikan hasil pelaksanaannya.
2. Dalam pelatihan menjahit, Kurangnya partisipasi masyarakat, dan Keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan yang di fasilitasi desa pelatihan sangat kurang.
3. Serta setelah mendapatkan pelatihan, peserta tidak melanjutkan usaha dengan keterampilan yang didapat dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya modal usaha.

Berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang mengikuti pelatihan, pelatihan yang dilakukan sangat mendasar dan tidak akan bisa apabila langsung dengan membuka usaha seperti yang di programkan, harusnya ada wadah tempat hasil karya masyarakat di pasarkan.

4. Peningkatan kapasitas/jumlah kelompok tani belum diiringi dengan peningkatan kualitas sehingga banyak ditemukan kelompok tani yang belum mandiri masih tetap ditentukan dari atas dalam berbagai hal, seperti menentukan usaha tani apa dan terlalu bergantung dengan pihak desa dalam berbagai hal.
5. Peningkatan kapasitas yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas yang mengakibatkan rendahnya kinerja kelompok tani yang mana juga dikarenakan rendahnya peran pengurus yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan kelompok tani ini sering dibentuk secara dadakan yang hanya aktif di saat-saat tertentu, seperti ketika ada pendistribusian pupuk subsidi, bantuan bibit, dan bantuan-bantuan lainnya.
6. Peningkatan produksi tanaman pangan lebih berfokus pada pengadaan alat penggilingan, namun produktivitas kelompok tani hasilnya rendah dan kurangnya pembinaan dari aparat penyuluhan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara lepas tersebut terlihat bahwa belum optimalnya pelatihan dari salah satu program pemberdayaan masyarakat Desa Beringin Taluk ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya program pemberdayaan ini, dan peneliti mengambil judul “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara**

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafii, 2010 : 14).

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2008 : 88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja

sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

### 2.1.1 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (the form of every human association for the attainment of a common purpose).

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karena tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab puncak pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

### 2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2009 : 11)

### 2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.1.4 Teori/Konsep Evaluasi**

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stutflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2017 : 289) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

#### **2.1.5 Teori/Konsep Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005 : 57).

### **2.1.6 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen dikembangkan. Menurut Schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison, dkk 2016 : 7).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat wewengannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

### **3. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di dapat :

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner yaitu :

Indikator Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Efektivitas Perencanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 149 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Perencanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa dalam Perencanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk sebenarnya sudah cukup baik, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat cukup baik menampung aspirasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya kurang baik, pelaksanaan hanya sekedar pelaksanaan saja, sekedar terlaksana saja tanpa memperhatikan hasil pelaksanaannya.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa sebenarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk sudah cukup baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menampung aspirasi masyarakat, terlihat dengan banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan di desa beringin taluk, namun dalam pelaksanaan pemberdayaan yang kurang maksimal, seperti halnya pelatihan menjahit yang tidak efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan yang hanya sekedar terlaksana saja, bahkan dalam kelompok tani rendahnya peran penguruh dan struktur organisasi yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Efektivitas Pencapaian tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 165 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pencapaian tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Pencapaian tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Cukup Baik, banyak program yang dilaksanakan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat engan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, meski tidak semua masyarakat yang menjadi penerima program pemberdayaan mampu memanfaatkan dengan baik.

Indikator Efisiensi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Efisiensi Usaha oleh pihak pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 139 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Usaha oleh pihak pelaksana pemberdayaan masyarakat Desa Beringin Taluk pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Usaha oleh pihak pelaksana pemberdayaan masyarakat Desa Beringin Taluk sudah cukup baik, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menampung aspirasi masyarakat dikarenakan cukup banyak pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa Beringin Taluk ini, meski tidak semuanya terlaksana dengan baik.

2. Tingkat Efisiensi Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 150 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Tingkat efisiensi Pemberdayaan Masyarakat desa Beringin Taluk pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Tingkat efisiensi Pemberdayaan Masyarakat desa Beringin Taluk sudah cukup baik, dimana semua program pemberdayaan masyarakat yang telah di rencanakan semuanya terlaksana, namun tidak semua terlaksana secara optimal.

3. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 152 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk Cukup baik, seperti pada pelatihan menjahit, meski setelah pelatihan tidak bisa langsung menghasilkan, hanya saja setidaknya masyarakat bisa mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut, begitu juga dengan pelatihan-pelatihan yang lain.

Indikator Kecukupan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kecukupan Sumber daya manusia dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 172 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kecukupan Sumber daya manusia dalam Pemberdayaan Masyarakat pada kategori Baik yang berada pada Interval 163 - 216.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kecukupan Sumber daya manusia dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk sudah baik, terlihat dengan pemberdayaan yang sudah terlaksana, serta sumberdaya manusia di pemerintahan desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat ini.

2. Kecukupan Sumber daya anggaran dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 207 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Sumber daya anggaran dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa pada kategori Baik yang berada pada Interval 163 - 216.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kecukupan Sumber daya anggaran dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah baik, dimana saat ini desa memiliki dana desa yang cukup banyak yang harusnya cukup diperuntuk sebagian untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Kecukupan peralatan yang ada dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 185 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kecukupan peralatan yang ada dalam Pemberdayaan Masyarakat pada kategori Baik yang berada pada Interval 163 – 216.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kecukupan peralatan yang ada dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah baik, terlihat dengan salah satu pemberdayaam, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit, desa sudah memiliki mesin jahit sendiri saja yang mana hal ini juga membuat optimalnya pelatihan yang dilakukan.

Indikator Perataan (*Equity*) / kesamaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Perataan (*Equity*) / kesamaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 141 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Perataan pemberdayaan yang diberikan pemerintahan desa pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Perataan pemberdayaan yang diberikan pemerintahan desa sudah cukup baik, sebagai contoh pelatihan menjahit, dimana yang mendapatkan pelatihan adalah orang-orang disetiap dusun yang ingin ikut, rata setiap dusun bukan hanya orang-orang yang itu-itu saja.

2. Kesamaan proses Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 153 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kesamaan proses Pemberdayaan desa. pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kesamaan proses Pemberdayaan desa Cukup baik, dimana pada dasarnya prosesnya sama saja, mulai dari rapat hingga apa yang akan dilaksanakan prosesnya sama.

3. Kesamaan pemberlakuan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 165 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kesamaan Pemberlakuan Pemberdayaan pada kategori Baik yang berada pada Interval 163 – 216.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kesamaan Pemberlakuan Pemberdayaan memang sudah baik, dimana pemberdayaan diberlakukan sama untuk seluruh masyarakat disetiap dusun yang ada di desa beringin ini.

Indikator Responsivitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Ketanggapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 141 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan ketanggapan pemerintahan desa Beringin Taluk dalam pemberdayaan pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa ketanggapan pemerintahan desa Beringin Taluk dalam pemberdayaan Cukup Baik, terlihat dengan tanggapnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa menampung aspirasi usulan pemberdayaan masyarakat disaat rapat dan melaksanakan pemberdayaan yang telah di susun dalam program desa.

2. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 146 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup baik, seperti pelatihan menjahit meski pelatihan-latihan yang sangat mendasar, namun hasil pelatihan cukup baik dimana sangat menambah pengetahuan peserta.

3. Kinerja pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 148 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kinerja pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat cukup baik, pemerintah menjalankan pemberdayaan masyarakat benar-benar berdasarkan hasil aspirasi dari masyarakat.

Indikator Ketepatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Ketepatan mengenai Pemberdayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 152 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Ketepatan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa Beringin Taluk dalam pemberdayaan pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang Ketepatan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa Cukup baik, dimana pemerintah desa sudah melaksanakan semua program pemberdayaan, dimana pemberdayaan yang dilakukan dan dimasukkan kedalam rencana pembangunan desa adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung di saat rapat yang di adakan pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 164 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat pada kategori Baik yang berada pada Interval 163 - 216.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hasil dari Pemberdayaan Masyarakat sudah baik, karena pada pelatihan menjahit sedikit banyak peserta sudah bisa menjahit, minimal peserta mengetahui dasar-dasar menjahit.

3. *Out come* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan *Out come* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 109 - 162.

*Berdasarkan* observasi penulis dilapangan bahwa *Out come* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah baik, karena pada pemberdayaan masyarakat program pelatihan menjahit yang dilakukan sudah membuat bisa menjahit dan minimal mengetahui teknik dasar dalam menjahit ini.

## 5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang

menghasilkan nilai rata-rata 158 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, Karena seluruh program pemberdayaan yang direncanakan sudah terlaksana, dimana dari pemberdayaan yang diharapkan pemberdayaan masyarakat yang dapat sedikit meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Benny hartoni, S.Pd dan Ibunda Elfa Elita, ST, Abang Gilang Maulana dan Adik Agung Maulana, serta suami tercinta Rika Putra yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- A.S Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Edy Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Indradi, Sjamsiar, Sjamsuddin, 2016. *Dasar – Dasar Admiistrasi Publik*, Malang, Agritek YPN Malang
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi. Aksara: Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta
- Ratminto dan Atik,. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung

- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003 *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta

Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi 2019.